



Analisis Jaringan Sosial Politik Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024

Melani Deswita Tanjung¹, Aidinil Zetra², Doni Hendrik³

¹Universitas Andalas, Padang, Indonesia, melanitjg25@gmail.com

²Universitas Andalas, Padang, Indonesia, aidinil@soc.unand.ac.id

³Universitas Andalas, Padang, Indonesia, doni@soc.unand.ac.id

Corresponding Author: melanitjg25@gmail.com¹

Abstract: *This study analyzes the political networks of the candidate pair Masinton Pasaribu and Mahmud Efendi Lubis in the 2024 Regional Head Election (Pilkada) of Central Tapanuli Regency. The focus of the research is directed at how the candidate pair utilized political networks to mobilize electoral support amidst limited resources and campaign time. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data were obtained through in-depth interviews with the supporting political parties, campaign teams, and social network actors involved, and supplemented with secondary data from documents and written sources. The analysis was conducted by referring to the political network theory of Aspinall and Sukmajati (2015) which includes three forms of networks: political parties, social network machines, and campaign teams and the social network theory of Ruddy Agusyanto (2011) which divides networks into dimensions of interest, power, and emotion. The results show that the victory of the Masinton-Mahmud pair was supported not only by the strength of the supporting parties PDI Perjuangan and the Labor Party, but also through the activation of social networks such as the Sukamas Movement, community organizations, youth groups, and religious networks. The synergy between formal and informal networks is a major factor that strengthens the legitimacy and effectiveness of mobilizing political support in Central Tapanuli.*

Keyword: *Political Networks; Regional Elections; Political Parties; Winning Teams; Community Organizations*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis jaringan politik pasangan Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2024. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana pasangan kandidat tersebut memanfaatkan jaringan politik untuk memobilisasi dukungan elektoral di tengah keterbatasan sumber daya dan waktu kampanye. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan partai politik pengusung, tim sukses, serta aktor-aktor jaringan sosial yang terlibat, dan dilengkapi dengan data sekunder dari dokumen dan sumber tertulis. Analisis dilakukan dengan merujuk pada

teori jaringan politik Aspinall dan Sukmajati (2015) yang meliputi tiga bentuk jaringan yaitu partai politik, mesin-mesin jaringan sosial, dan tim sukses serta teori jaringan sosial Ruddy Agusyanto (2011) yang membagi jaringan ke dalam dimensi kepentingan, kekuasaan, dan emosional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemenangan pasangan Masinton–Mahmud tidak hanya ditopang oleh kekuatan partai pengusung PDI Perjuangan dan Partai Buruh, tetapi juga melalui aktivasi jaringan sosial seperti Gerakan Sukamas, organisasi masyarakat, kelompok pemuda, dan jaringan keagamaan. Sinergi antara jaringan formal dan non-formal menjadi faktor utama yang memperkuat legitimasi dan efektivitas mobilisasi dukungan politik di Tapanuli Tengah.

Kata Kunci: Jaringan Politik, Pilkada, Partai Politik, Tim Pemenangan, Organisasi Masyarakat

PENDAHULUAN

Dalam sistem demokrasi, Pemilu merupakan salah satu syarat mutlak dalam melaksanakan kedaulatan rakyat. Secara umum, Pemilu di Indonesia mencakup Pemilu Legislatif untuk pusat dan daerah dan Pemilu Eksekutif untuk Presiden dan Kepala Daerah. Pemilihan kepala daerah atau Pilkada merupakan mekanisme politik yang disepakati bersama untuk memilih kepala daerah seperti Gubernur, Wali Kota, dan Bupati yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan ini menjadi dasar Pilkada yang bertujuan sebagai sarana dalam melaksanakan demokratisasi di tingkat lokal, guna melahirkan kepemimpinan daerah yang berkualitas, amanah, akuntabel, dan mengutamakan kepentingan rakyat.

Pencalonan kepala daerah memerlukan dukungan politik untuk memenangkan Pilkada yang diperoleh dari kelompok partisan maupun kelompok di luar area lingkaran partai politik. Kelompok pendukung ini akan menjadi sebuah jaringan politik yang kuat dalam memenangkan pasangan calon kepala daerah yang dapat dimanfaatkan oleh kandidat untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Pada pelaksanaan Pilkada, jaringan sosial dan jaringan politik memainkan peran sentral dalam memobilisasi dukungan elektoral.

Jaringan politik merupakan suatu jaringan di mana ikatan-ikatan politik yang menghubungkan satu aktor ke aktor politik lainnya untuk menjalin hubungan politik yang berkelanjutan sehingga satu sama lain saling terikat dengan seperangkat harapan yang sama (Danny, 2006). Dengan jaringan politik, calon kandidat dapat melakukan kampanye politik melalui kerja aktor-aktor politik yang bergerak dalam membangun opini publik. Sementara, jaringan sosial merujuk pada hubungan antar individu dan norma serta kepercayaan yang tumbuh melalui hubungan tersebut, di mana posisi yang terjadi di antara aktor dan relasi yang kemudian menjadi kunci utama dalam studi jaringan sosial (Eriyanto, 2014).

Pada pelaksanaan Pilkada, calon kandidat akan memanfaatkan jaringan sosial dan jaringan politik yang dimilikinya untuk memenangkan pencalonan. Mereka akan memanfaatkan kepercayaan sosial (*social trust*) yang ada dalam suatu jaringan untuk mendapatkan dukungan politik. Kekuatan dan luasnya jaringan ini dapat menjadi modal penting bagi seorang calon kandidat dalam memobilisasi dan memenangkan kontestasi elektoral. Kemudian Aspinall dan Sukmajati (2015) menyebutkan terdapat tiga bentuk jaringan dalam menjalankan patronase dalam Pemilu. Pertama, partai politik yang berperan dalam mengusung dan mengorganisir kampanye di akar rumput untuk mendukung kandidat. Kedua, mesin-mesin jaringan sosial yang terdiri dari kelompok-kelompok atau organisasi masyarakat yang mendukung mobilisasi pencalonan kandidat. Ketiga, tim sukses atau tim pemenangan merupakan bentuk jaringan yang paling umum digunakan oleh kandidat.

Selanjutnya, untuk menjelaskan bentuk jaringan politik tersebut, digunakan jaringan sosial yang akan dibedakan menjadi tiga jenis jaringan. Pertama, jaringan kepentingan yang

terbentuk dari hubungan sosial yang bermuatan kepentingan. Kedua, jaringan kekuatan yang berbentuk kuasa dalam mempengaruhi dan memanfaatkan sumber daya. Ketiga, jaringan emosional yang terbentuk atas dasar hubungan sosial yang bermuatan emosi. Jaringan tersebut terbentuk antara satu individu dengan individu lainnya yang kemudian berkembang sesuai keberadaan dan hal yang dilakukan oleh individu sehingga berpengaruh terhadap elektabilitas kandidat.

Pilkada serentak yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 di seluruh Indonesia, salah satunya di kabupaten Tapanuli Tengah provinsi Sumatera Utara. Pilkada yang terjadi di Tapanuli Tengah menjadi kasus yang menarik untuk dikaji, di mana terdapat sebuah fenomena unik yakni dengan menciptakan pasangan calon tunggal dengan tujuan tidak ada kompetitor lawan untuk berkompetisi pada Pilkada. Menurut Arteria Dahlan skenario calon tunggal yang terjadi di Tapanuli Tengah pada Pilkada tahun 2024 dilakukan dengan, (1) memborong dukungan partai politik yang memiliki kursi DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, (2) memaksa dukungan dari pejabat struktural dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintahan daerah Tapanuli Tengah, dan (3) mempengaruhi dan mengintervensi penyelenggara pemilu di daerah Tapanuli Tengah. Sehingga proses pencalonan salah satu kandidat yakni Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis yang diusung oleh koalisi kecil yaitu PDI Perjuangan dan Partai Buruh berhadapan dengan pasangan yang didukung oleh koalisi besar partai politik peserta Pemilu.

Pencalonan pasangan kandidat Masinton dan Mahmud dilakukan setelah keluarnya putusan MK No. 7/PPU-XXII/2024 terhadap UU Pilkada yang dituangkan dalam PKPU Nomor 8 Tahun 8 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa partai atau gabungan partai politik Pemilu dapat mengajukan calon kepala daerah, meski tidak mempunyai kursi DPRD dengan ambang batas yang diatur sesuai dengan persyaratan. Peraturan ini dikeluarkan oleh MK untuk menghindari terjadinya pasangan calon tunggal yang melawan kotak kosong. Setelah dikeluarkannya putusan MK tersebut, PDI Perjuangan di tingkat pusat melakukan evaluasi kembali dan menarik dukungan yang sebelumnya diberikan kepada pasangan sebelumnya serta mengusung kembali kader partai politiknya yakni Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis pada Pilkada Tapanuli Tengah tahun 2024.

Selain itu, kabupaten Tapanuli Tengah memiliki karakteristik masyarakatnya yang heterogen dengan komposisi penduduk yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Keberagaman ini menciptakan struktur sosial yang kompleks, di mana jaringan kekerabatan adat, dan kegamaan menjadi basis penting dalam memobilisasi politik lokal. Dalam konteks seperti ini, kesuksesan calon kandidat bergantung pada kemampuannya dalam membangun dan memanfaatkan jaringan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dari hasil pemungutan suara Pilkada, menghasilkan pasangan calon Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis sebagai pemenang kontestasi politik dengan selisih suara tipis dari pasangan calon Kiyedi dan Darwin yakni:

Tabel 1. Perolehan Suara pada Pilkada Tapanuli Tengah tahun 2024

No	Pasangan Kandidat	Perolehan	Persentase
1.	Khairul - Kiyedi	74.208	46,01%
2.	Masinton - Mahmud	87.095	53,99%

Sumber: Data Sekunder KPU Tapanuli Tengah

Berdasarkan pada tabel tersebut, pasangan Masinton Mahmud ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah. Dengan dinamika yang terjadi selama proses pencalonan termasuk penolakan berkas pendaftaran oleh KPU Tapanuli Tengah dan keterbatasan waktu kampanye yang hanya berlangsung selama dua bulan penuh. Kondisi ini mempertanyakan bagaimana pasangan tersebut mampu memobilisasi dukungan dan memenangkan kontestasi Pilkada dengan berhasil menang di 17 kecamatan dari total 20 kecamatan yang ada di Tapanuli Tengah.

Studi ini kemudian akan dijelaskan dalam bentuk-bentuk jaringan politik yang dikemukakan oleh Aspinall dan Sukmajati yakni partai politik, mesin-mesin jaringan sosial, dan tim sukses yang akan dikaitkan dengan teori jaringan yang dikemukakan oleh Ruddy Agusyanto yakni melalui jaringan kepentingan, jaringan kekuasaan, dan jaringan emosional. Bentuk-bentuk jaringan politik ini kemudian dimanfaatkan oleh pasangan Masinton dan Mahmud dalam memobilisasi dukungan elektoral pemilih Tapanuli tengah

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menekankan pada pengamatan fenomena dan meneliti substansi dari fenomena tersebut. Singkatnya, penelitian kualitatif ini berfokus pada analisis dan ketajaman dalam menjelaskan suatu fenomena atau kenyataan sosial yang sejatinya tidak dapat dicapai melalui prosedur kuantitatif (Strauss and Corbin, 2006). Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk memahami makna dan menggali pengalaman baik individu maupun kelompok terkait permasalahan sosial dan kemanusiaan (Cresswell, 2018). Tipe penelitian ini adalah studi kasus yang bertujuan untuk menguji pertanyaan dan masalah penelitian, yang tidak dapat dipisahkan antara fenomena dan konteks di mana fenomena tersebut terjadi (Robert K Yin, 2014)

Penelitian ini menggunakan data primer dari wawancara dengan partai politik, tim sukses, dan mesin-mesin jaringan sosial yang terlibat dalam pencalonan Masinton Mahmud dan berhasil memobilisasi masyarakat pemilih Tapanuli Tengah. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui informasi dari sumber tertulis atau dari dokumen yang menjadi pelengkap dari penggunaan metode wawancara. Selanjutnya Peneliti akan mengolah hasil wawancara menjadi data yang telah dikategorikan sesuai dengan teori yang telah ditetapkan. Reduksi data dilakukan untuk memilih hasil wawancara yang tepat untuk dimasukkan ke dalam tulisan. Peneliti melakukan validasi dengan membandingkan temuan dengan sumber lain, kemudian peneliti menghubungkan data yang telah dikategorikan dengan teori atau referensi tambahan. Setelah langkah-langkah ini selesai, peneliti akan menyimpulkan hasil penelitiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Aspinall dan Sukmajati (2015) bentuk-bentuk jaringan politik yang digunakan pada Pemilu yaitu partai politik, mesin-mesin jaringan sosial, dan tim sukses. Tiga bentuk jaringan politik tersebut akan dijelaskan dengan teori jaringan yang dikemukakan oleh Ruddy Agusyanto yaitu jaringan kepentingan, jaringan kekuasaan, dan jaringan emosional.

PDI Perjuangan dan Partai Buruh sebagai Partai Politik Pengusung

Partai politik menjadi salah satu bentuk jaringan politik formal yang mendukung pencalonan pasangan kandidat pada Pilkada. Sebagai institusi formal, partai politik memiliki peran strategis dalam melakukan rekrutmen politik, seleksi kepemimpinan, dan mobilisasi dukungan publik. Pada Pilkada Tapanuli Tengah tahun 2024, PDI Perjuangan berperan sebagai partai politik pengusung utama pasangan Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis yang secara struktural dan ideologis menjadi fondasi utama pembentukan jaringan politik pasangan calon tersebut.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Masinton, pencalonannya merupakan hasil dari proses internal partai yang bersifat hierarkis dan terlegitimasi secara administratif melalui rekomendasi resmi dari DPP PDI Perjuangan. Struktur formal ini tidak hanya berfungsi sebagai saluran legitimasi politik, namun juga sebagai sistem jaringan kekuasaan, sebagaimana yang disampaikan oleh Ruddy Agusyanto, bahwa organisasi politik memiliki kapasitas untuk mengontrol dan menggerakkan sumber daya secara hierarki melalui satu komando politik yang sama. Struktur partai politik membentuk jaringan kekuasaan yang

efektif dalam mendistribusikan informasi politik, mengkoordinasikan strategi pemenangan, serta memobilisasi dukungan di tingkat akar rumput. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu informan, Sarma Hutajulu dan Augustus Hutagalung bahwasanya jaringan kader partai diaktifkan kembali hingga ke tingkat dusun dan desa sebagai ujung tombak kampanye Masinton Mahmud. Aktivasi jaringan kader ini merupakan perwujudan jaringan politik formal yang tidak hanya bersifat simbolik, namun juga operasional dan substansif dalam proses mobilisasi pemilih.

Jika dihubungkan dengan teori modal oleh Robert D. Putnam, bahwasanya jaringan partai politik seperti ini memperlihatkan pentingnya unsur kepercayaan, norma sosial, dan jaringan kerja sama dalam memperkuat efektivitas demokrasi. Hubungan yang terbentuk antara aktor politik, kader partai, dan masyarakat di tingkat lokal menunjukkan adanya jaringan sosial dan politik yang dibangun atas dasar kepercayaan dan solidaritas. Meskipun, pasangan Masinton Mahmud memiliki keterbatasan sumber daya finansial, namun kehadiran modal sosial yang kuat melalui jejaring partai dan relawan menjadi faktor kompensatif dalam proses kampanye.

Selain itu, strategi PDI Perjuangan dalam mengidentifikasi dan melibatkan aktor-aktor politik yang memiliki keterikatan kedaerahan dan emosional dengan masyarakat Tapanuli Tengah memperkuat dimensi jaringan vertikal antara struktur partai di tingkat pusat dengan basis lokal. Kehadiran kader nasional dan lokal yang memiliki akar sosial di daerah memperkuat legitimasi simbolik serta kredibilitas elektoral pasangan calon. Sebagaimana menurut Agusyanto bahwa dalam jaringan kekuasaan, efektivitas mobilisasi sangat bergantung pada kepadatan dan konektivitas antar simpul jaringan yang terhubung dalam sistem sosial dan politik.

Berdasarkan temuan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran partai politik pengusung dalam Pilkada Tapanuli Tengah merupakan manifestasi dari teori jaringan yang dikemukakan oleh Agusyanto. Struktur organisasi PDI Perjuangan berfungsi sebagai jaringan kekuasaan yang mengatur aliran informasi, koordinasi, dan mobilisasi dukungan sementara aktor yang terlibat membentuk jaringan sosial berbasis kepercayaan dan solidaritas yang memperkuat efektivitas kampanye politik. Dengan demikian, partai politik pengusung tidak hanya bertindak sebagai institusi administratif, namun juga sebagai jaringan politik yang menjadi infrastruktur utama dalam mobilisasi pemilih dan pembentukan legitimasi elektoral pasangan calon kandidat.

Mesin-Mesin Jaringan Sosial

Menurut Aspinall dan Sukmajati, mesin-mesin jaringan sosial merupakan salah satu bentuk jaringan politik bergantung pada struktur sosial dan budaya dalam memobilisasi dukungan elektoral (Aspinall & Sukmajati, 2015). Pada bagian ini, peneliti akan membagi menjadi beberapa bagian mesin-mesin jaringan sosial yang digunakan dan dimanfaatkan oleh pasangan Masinton dan Mahmud dalam memobilisasi basis dukungan elektoral yakni:

1. Gerakan Sukamas Tapteng Baru

Gerakan Sukamas merupakan sebuah jaringan yang dibentuk dua tahun sebelum pelaksanaan Pilkada dalam upaya mengenalkan Masinton Pasaribu kepada masyarakat Tapanuli Tengah. Gerakan ini terbentuk karena adanya kesamaan kepentingan antara aktor politik dengan masyarakat yang kemudian dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tertentu seperti kepentingan politik. Menurut Demakson, pembentukan gerakan Sukamas ini merupakan wujud nyata dari semangat sosial dan politik masyarakat Tapanuli Tengah yang menginginkan perubahan terhadap kondisi pemerintahan sebelumnya. Melalui kerja-kerja lapangan yang sudah dilakukan sejak tahun 2022, jaringan ini tidak hanya berperan sebagai wadah aspirasi masyarakat, namun kemudian berkembang menjadi struktur organisasi yang terkoordinasi hingga ke tingkat desa untuk mengenalkan sosok figur Masinton Pasaribu

kepada masyarakat Tapanuli Tengah. Kelompok jaringan ini kemudian dipelihara sampai mencapai tujuan kelompoknya yakni menginginkan perubahan untuk Tapanuli Tengah.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Sarma Hutajulu, jaringan Sukamas disinergikan kembali di tiap-tiap kecamatan, kelurahan, dan desa-desa yang kemudian dikolaborasikan dengan membangun simpul-simpul bersama partai politik, organisasi masyarakat maupun pendukung individu. Gerakan ini dimanfaatkan sebagai basis elektoral dan juga menjadi simpul utama dalam jaringan kepentingannya seperti yang disampaikan oleh Ruddy, jaringan kepentingan ini merupakan pola hubungan yang terbentuk karena adanya kesamaan kepentingan antara aktor-aktor politik.

Jika merujuk pada jaringan kekuasaan yakni pada kemampuan aktor politik dalam mengakses, menggunakan dan mendistribusikan sumber daya kekuasaan melalui struktur formal dan informal. Dalam konteks ini, Masinton dan Mahmud mengakses dan memanfaatkan kekuatan struktural kelompok gerakan Sukamas Tapteng Baru sebagai mesin kekuasaan politik yang tidak bersifat partai politik, namun memiliki jaringan yang lias, solid, dan berlapis di tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa-desa. Menurut Sarma, gerakan Sukamas memiliki basis dukungan yang sudah menjangkau masyarakat sehingga gerakan ini memastikan bahwa kegiatan kampanye dapat berjalan lancar, pesan politik dapat disampaikan dengan tepat, dan terbentuk hubungan emosional dengan masyarakat yang mengharapkan perubahan tersebut terjaga dengan baik.

Dalam teori jaringan politik yakni melalui jaringan emosional yang merujuk pada relasi emosional yang dibangun atas dasar kepercayaan, loyalitas, pengalaman bersama, dan rasa senasib (Ruddy Agusyanto, 2011). Sebagaimana munculnya Masinton sebagai salah satu kontestasi Pilkada membangkitkan semangat juang masyarakat yang sudah lama terbelenggu dengan pemerintahan sebelumnya. Munculnya gerakan ini seolah-olah memberikan rasa kedekatan, empati, dan kepercayaan kepada masyarakat. Dalam konteks tersebut, emosi menjadi salah satu modal sosial yang mengikat individu melalui rasa solidaritas dan harapan akan perubahan. Gerakan ini kemudian bertransformasi sebagai wadah moral dan emosional yang menyatukan berbagai elemen masyarakat, mulai dari kelompok relawan, tokoh agama, hingga birokrat. Dalam proses tersebut, jaringan emosional berfungsi sebagai energi penggerak utama, yang memperkuat ikatan sosial antar anggota jaringan dan menjadi instrumen mobilisasi politik yang efektif dalam kemenangan Masinton Mahmud. Dengan demikian, pembentukan gerakan Sukamas menegaskan bahwa politik lokal tidak semata digerakkan oleh kekuatan material dan struktural, namun oleh kekuatan emosional yang lahir dari kesadaran bersama terhadap keadilan dan perubahan.

2. Jaringan suku Batak

Dalam konteks Pilkada Tapanuli Tengah, suku Batak memainkan peran penting dalam membentuk pola hubungan sosial politik yang berbasis pada sistem kekerabatan. Struktur sosial masyarakat Batak yang dikenal dengan Dalihan Na Tolu yang menekankan pada relasi antara hula-hula, dongan tubu, dan boru, menjadi fondasi terbentuknya solidaritas sosial dan modal sosial yang kuat. Solidaritas ini bertransformasi menjadi mesin jaringan sosial yang dimanfaatkan oleh Masinton Mahmud untuk memobilisasi dukungan politik.

Pemanfaatan jaringan kekerabatan berbasis Marga dan sistem Dalihan Na Tolu menunjukkan bagaimana identitas kultural dan genealogis dapat berfungsi sebagai instrumen politik elektoral. Seperti yang dijelaskan oleh Masinton bahwa jaringan sosial berbasis adat Batak menjadi sarana untuk meneguhkan kedekatan emosional dan simbolik antara kandidat dan pemilih yang menunjukkan bagaimana modal sosial berperan sebagai kekuatan integratif dalam politik lokal.

Salah satu bentuk konkret dari jaringan sosial ini adalah Pomparan Guru Tatea Bulan, yakni perkumpulan keturunan Raja Batak yang mencakup seluruh Marga Batak. Struktur ini menjadi jaringan politik yang terorganisir secara kultural dan tersebar hingga ketingkat desa. Dengan dukungan tokoh seperti Hasva Pasaribu selaku ketua tim kemenangan Marga,

jaringan ini dikonversi sebagai mesin politik yang elektoral. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ruddy bahwa jaringan politik terbentuk melalui interaksi antar aktor yang saling terhubung oleh kepentingan dan kepercayaan, di mana kekuasaan dijalankan melalui struktur relasional dan kompleks. Dalam konteks ini, jaringan Marga berfungsi sebagai jaringan kekuasaan informal yang menopang efektivitas mobilisasi politik dan memperluas legitimasi elektoral pasangan Masinton dan Mahmud.

3. Himpunan Masyarakat Nias

Dalam kontestasi Pilkada Tapanuli Tengah tahun 2024, pasangan Masinton Mahmud memanfaatkan beragam mesin jaringan sosial yang berakar pada struktur sosial dan kultural masyarakat setempat. Salah satu bentuknya adalah jaringan berbasis etnis Nias yang dihimpun melalui organisasi Himpunan Masyarakat Nias Indonesia (HIMNI) dan jaringan keagamaan Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG) serta Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional (Bamagnas). Jaringan ini dikoordinasikan oleh Famoni Gulo, tokoh masyarakat sekaligus ketua DPC HIMNI Tapanuli Tengah, yang juga aktif di BKAG dan Bamagnas.

Peran Famoni Gulo memperlihatkan bagaimana modal sosial dan kekuasaan simbolik (Bourdieu, 1986) dapat dikonversi menjadi sumber daya politik. Ia memiliki legitimasi struktural melalui HIMNI dan otoritas moral melalui organisasi keagamaan, yang secara simultan dimanfaatkan untuk membangun kepercayaan dan loyalitas elektoral terhadap pasangan Masinton Mahmud. Hubungan kekerabatan, etnisitas, dan keagamaan yang telah lama terbentuk di masyarakat menjadi kanal komunikasi yang efektif dalam menyebarkan pesan politik dan melakukan mobilisasi pemilih di tingkat akar rumput.

Temuan ini memperkuat pandangan Aspinall dan Sukmajati (2015) yang menyatakan bahwa mesin-mesin jaringan sosial dalam politik lokal Indonesia berakar pada struktur sosial, kultural, dan religius masyarakat. Mesin ini bekerja melalui aktivasi jaringan sosial yang sudah ada seperti kelompok etnis, organisasi keagamaan, atau komunitas lokal untuk tujuan mobilisasi dukungan politik tanpa harus mengandalkan sumber daya material yang besar. Dalam konteks ini, jaringan HIMNI, BKAG, dan Bamagnas berfungsi sebagai jaringan kekuasaan informal yang beroperasi melalui saluran kepercayaan dan solidaritas komunitas.

Kombinasi antara kekuasaan etnis dan kekuasaan religius menciptakan sinergi jaringan sosial-politik, di mana Masinton Mahmud tidak hanya memperoleh dukungan dari komunitas Nias secara umum, tetapi juga dari segmen Nias Kristen yang menjadi mayoritas di wilayah tersebut. Dukungan simbolik dari tokoh nasional seperti Yasonna Laoly, yang juga berasal dari Nias dan merupakan kader PDI Perjuangan, memperkuat legitimasi politik dan emosional pasangan calon di mata pemilih. Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial dan identitas kolektif dapat berfungsi sebagai mesin penggerak mobilisasi politik, yang memadukan dimensi etnis, religius, dan partai politik dalam satu kesatuan jaringan kekuasaan.

Dengan demikian, strategi politik pasangan Masinton Mahmud mencerminkan bentuk transformasi jaringan sosial menjadi jaringan politik, di mana hubungan etnis dan keagamaan berperan sebagai instrumen mobilisasi elektoral. Melalui pendekatan berbasis komunitas, aktor politik tidak hanya mengkapitalisasi struktur sosial yang telah ada, tetapi juga membangun kepercayaan sosial (*social trust*) yang menjadi dasar terbentuknya loyalitas politik. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa dalam politik lokal Indonesia, mesin-mesin jaringan sosial merupakan fondasi utama dari jaringan kekuasaan politik yang menentukan efektivitas mobilisasi dan konsolidasi dukungan elektoral di tingkat akar rumput.

4. Gerakan Muda Islam

Dalam konteks Pilkada Tapanuli Tengah, Gerakan Muda Islam (Gemuis) menjadi salah satu simpul penting dalam mesin jaringan sosial pasangan Masinton Mahmud, khususnya dalam memobilisasi dukungan berbasis komunitas keagamaan. Gerakan ini dipelopori oleh tokoh agama lokal Dayan Pasaribu, yang memiliki pengaruh sosial dan keagamaan kuat di wilayah tersebut. Keterlibatan Gemuis menunjukkan bagaimana jaringan religius dapat dimanfaatkan sebagai mesin politik non-formal yang bekerja di luar struktur partai, namun

memiliki efektivitas tinggi karena berakar pada kepercayaan (trust), solidaritas sosial, dan otoritas religius.

Strategi pasangan Masinton Mahmud untuk melibatkan Dayan Pasaribu sebagai penasihat pemenangan menggambarkan adanya integrasi modal sosial dan modal religius dalam proses politik lokal. Sebagaimana dijelaskan oleh Pierre Bourdieu (1986), modal sosial berupa relasi, kepercayaan, dan jaringan sosial dapat dikonversi menjadi modal politik yang meningkatkan legitimasi dan dukungan elektoral. Dalam hal ini, Gemuis berfungsi sebagai wadah konversi modal sosial religius menjadi modal politik elektoral, melalui aktivitas dakwah, pertemuan keagamaan, dan hubungan kekeluargaan di tingkat akar rumput.

Kegiatan Gemuis, seperti shalat berjamaah, pengajian, dan pertemuan keluarga yang disisipi pesan-pesan politik, menunjukkan bahwa ruang-ruang sosial keagamaan dapat menjadi arena mobilisasi elektoral yang efektif. Fenomena ini sejalan dengan konsep “mesin jaringan sosial” yang dikemukakan oleh Edward Aspinall dan Mada Sukmajati (2015), di mana jaringan sosial yang telah mapan baik berbasis agama, etnis, maupun profesi dapat diaktifkan oleh aktor politik untuk membangun basis dukungan yang loyal. Dalam konteks ini, Gemuis bertindak sebagai jaringan penggerak berbasis otoritas religius, yang memperkuat daya tarik politik pasangan kandidat melalui kedekatan simbolik dan nilai moral keagamaan.

Hubungan antara Dayan Pasaribu dan pasangan Masinton Mahmud memperlihatkan adanya relasi pertukaran strategis sebagaimana dijelaskan dalam teori jaringan kekuasaan Ruddy Agusyanto (2007), di mana interaksi antara aktor politik dan tokoh masyarakat menciptakan hubungan timbal balik berbasis kepentingan dan pengaruh. Dayan memperoleh legitimasi sosial dan posisi religius strategis sebagai Imam di Masjid Al Muslimin Pandan, sementara pasangan Masinton Mahmud mendapatkan dukungan politik dari jaringan umat yang dipengaruhi Dayan.

Dengan demikian, Gemuis dapat dipahami sebagai bentuk mesin jaringan sosial keagamaan yang beroperasi sebagai jaringan politik informal. Ia berperan dalam mentransformasikan nilai-nilai sosial dan religius menjadi kekuatan elektoral yang nyata. Melalui pendekatan berbasis kedekatan emosional, nilai religius, dan kegiatan sosial, jaringan ini tidak hanya memperkuat legitimasi moral kandidat, tetapi juga mengokohkan struktur dukungan politik berbasis komunitas Muslim di Tapanuli Tengah.

5. Pemuda

Dalam konteks Pilkada Tapanuli Tengah tahun 2024, kelompok pemuda berperan tidak hanya sebagai pemilih pasif, tetapi juga sebagai mesin jaringan sosial politik yang dinamis dan strategis. Melalui organisasi seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), pasangan Masinton Mahmud berhasil membangun dan menggerakkan basis dukungan politik dari kalangan muda. Pemuda memiliki posisi strategis karena karakteristiknya yang kreatif, adaptif terhadap teknologi, serta mampu menjembatani berbagai lapisan sosial. Hal ini menjadikan jaringan pemuda sebagai salah satu simpul utama dalam mesin mobilisasi politik non-formal yang beroperasi di luar struktur partai politik.

Keterlibatan Raju sebagai Ketua Tim Pemenangan Bidang Pemuda dan Milenial menjadi manifestasi dari strategi politik Masinton Mahmud dalam memanfaatkan modal sosial pemuda. Sebagai tokoh muda yang aktif di KNPI, Raju memiliki kapasitas untuk menjangkau kelompok muda dan organisasi kemahasiswaan seperti HMI, GMKI, Pemuda Muhammadiyah, dan Pemuda NU. Konsolidasi lintas organisasi ini menunjukkan adanya pola koordinasi horizontal dalam jaringan sosial politik sebagaimana dikemukakan oleh Edward Aspinall dan Mada Sukmajati (2015), bahwa jaringan sosial dalam politik lokal Indonesia bekerja melalui simpul-simpul sosial yang saling berinteraksi dan memperkuat proses mobilisasi elektoral. Melalui kegiatan seperti seminar kepemudaan, dialog lintas organisasi, dan kegiatan sosial, jaringan pemuda berperan dalam mengomunikasikan visi perubahan dan citra politik pasangan Masinton Mahmud. Aktivitas ini menunjukkan bahwa modal sosial (social capital) yang dimiliki kelompok pemuda, berupa kepercayaan, solidaritas,

dan jejaring sosial, telah dikonversi menjadi modal politik (political capital) sebagaimana dijelaskan oleh Pierre Bourdieu (1986). Dalam hal ini, Masinton Mahmud tidak hanya mengandalkan mesin partai formal, tetapi juga mengaktifkan jaringan sosial kepemudaan sebagai arena reproduksi pengaruh politik dan legitimasi moral.

Lebih lanjut, keterlibatan organisasi pemuda seperti KNPI juga memperlihatkan bagaimana relasi kekuasaan informal terbentuk melalui pertukaran timbal balik antara aktor politik dan aktor sosial. Sejalan dengan teori jaringan kekuasaan Ruddy Agusyanto (2007), interaksi antara Masinton Mahmud dan kelompok pemuda mencerminkan hubungan simbiotik di mana dukungan politik diberikan dengan imbalan akses, partisipasi, dan peluang bagi generasi muda dalam ruang publik. Dukungan KNPI dan jaringan organisasi mahasiswa seperti GMKI menunjukkan bagaimana ikatan emosional dan solidaritas generasional dapat menjadi kekuatan politik elektoral yang signifikan di tingkat lokal.

Fenomena ini menegaskan bahwa mesin jaringan sosial berbasis kepemudaan merupakan bentuk jaringan politik yang bekerja secara non-formal namun efektif, karena memiliki kemampuan untuk membangun kepercayaan, solidaritas, dan kedekatan sosial yang sulit dicapai oleh struktur partai. Melalui pendekatan horizontal dan komunikasi langsung, Masinton Mahmud berhasil mengubah jaringan pemuda menjadi instrumen mobilisasi elektoral yang strategis dalam memenangkan kontestasi Pilkada Tapanuli Tengah. Dengan demikian, jaringan kepemudaan seperti KNPI berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan kandidat, sekaligus menjadi instrumen konversi modal sosial menjadi modal politik. Strategi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pasangan Masinton Mahmud tidak hanya ditentukan oleh kekuatan partai, tetapi juga oleh kemampuan mereka dalam mengaktifkan dan memanfaatkan jaringan sosial yang hidup di tengah masyarakat, khususnya jaringan pemuda sebagai mesin sosial politik yang berorientasi pada perubahan dan integritas demokrasi lokal

6. Pemuda Pancasila

Keterlibatan organisasi masyarakat Pemuda Pancasila (PP) dalam kemenangan pasangan Masinton Mahmud pada Pilkada Tapanuli Tengah tahun 2024 menunjukkan bagaimana organisasi berbasis ideologi dan solidaritas sosial dapat bertransformasi menjadi mesin jaringan sosial politik yang efektif di tingkat lokal. Sebagai salah satu organisasi masyarakat terbesar di Sumatera Utara, Pemuda Pancasila memiliki struktur kepengurusan hingga ke tingkat kecamatan dan desa. Hal ini menjadikan PP sebagai simpul sosial yang memiliki daya jangkauan luas dalam proses mobilisasi dukungan politik.

Dari hasil wawancara dengan Bustanir Sihombing, terungkap bahwa keterlibatan Pemuda Pancasila tidak lahir semata karena kedekatan struktural dengan partai politik, melainkan berangkat dari kedekatan personal dan kesamaan nilai perjuangan dengan figur Masinton Mahmud. Nilai-nilai yang diusung Masinton, seperti keberanian melawan ketidakadilan dan komitmen terhadap perubahan sosial, dipersepsikan sejalan dengan ideologi Pancasila yang menjadi dasar perjuangan organisasi tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa relasi ideologis dan emosional menjadi dasar terbentuknya dukungan politik dalam jaringan non-formal yang bekerja di luar struktur partai.

Dalam konteks ini, Pemuda Pancasila berperan sebagai mesin jaringan sosial (social network machine) yang beroperasi berdasarkan hubungan informal, solidaritas sosial, dan loyalitas kolektif. Sebagaimana dikemukakan oleh Aspinall dan Sukmajati (2015), jaringan sosial dalam politik lokal Indonesia kerap bekerja melalui mekanisme non-formal di mana dukungan politik dibangun lewat relasi personal, interaksi sosial, serta ikatan kepercayaan antar-aktor. Jaringan semacam ini menjadi alternatif dari mesin partai yang cenderung kaku dan terbatas pada struktur formal.

Lebih jauh, teori modal sosial Pierre Bourdieu (1986) dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana Pemuda Pancasila mengonversi modal sosialnya berupa jaringan anggota, solidaritas, dan legitimasi moral menjadi modal politik (political capital) bagi pasangan

Masinton Mahmud. Melalui keanggotaan yang tersebar hingga tingkat desa, Pemuda Pancasila mampu menggerakkan potensi sosial untuk memperkuat basis elektoral. Aktivitas seperti mengawal kegiatan kampanye, membantu distribusi logistik, hingga menjaga keamanan kotak suara menunjukkan bahwa jaringan sosial berbasis organisasi dapat berfungsi sebagai infrastruktur politik informal yang menopang proses elektoral.

Sebagaimana dijelaskan oleh Agusyanto (2007) dalam teori jaringan kekuasaan, hubungan antara aktor politik dan organisasi masyarakat seperti Pemuda Pancasila merupakan bentuk pertukaran timbal balik (*reciprocal exchange*). Dalam hal ini, organisasi masyarakat memperoleh pengakuan dan akses politik melalui keterlibatan mereka dalam kampanye, sementara kandidat memperoleh dukungan sosial yang konkret di lapangan. Relasi ini menciptakan jaringan kekuasaan lokal yang beroperasi melalui hubungan personal, rasa saling percaya, dan orientasi pada kepentingan bersama.

Peran Pemuda Pancasila dalam mengawal kotak suara dan menjaga integritas pemilu juga menunjukkan fungsi lain dari mesin jaringan sosial, yaitu sebagai penjaga moralitas elektoral. Meskipun tidak secara formal menjadi bagian dari struktur tim sukses, PP menjalankan peran strategis dalam menjaga keamanan dan memastikan keadilan dalam proses pemungutan suara. Dengan demikian, organisasi ini bukan hanya sekadar alat mobilisasi politik, tetapi juga aktor sosial yang berkontribusi terhadap stabilitas dan legitimasi proses demokrasi lokal. Dengan demikian, keterlibatan Pemuda Pancasila dapat dipahami sebagai wujud konkret dari mesin-mesin jaringan sosial politik, yaitu struktur informal yang menghubungkan kandidat dengan masyarakat melalui relasi sosial, ideologis, dan emosional. Dalam konteks Pilkada Tapanuli Tengah, jaringan ini berfungsi sebagai perantara politik (*political intermediary*) yang mengintegrasikan nilai-nilai perjuangan, solidaritas sosial, dan kepentingan elektoral dalam satu kesatuan gerakan politik lokal yang efektif.

Tim Pemenangan MAMA

Dalam konteks Pilkada Tapanuli Tengah tahun 2024, pembentukan Tim Pemenangan MAMA (Masinton–Mahmud) merupakan bentuk nyata dari mekanisme mesin jaringan sosial politik sebagaimana dikemukakan oleh Aspinall dan Sukmajati (2015), yang menyebut bahwa jaringan politik dalam kontestasi elektoral di Indonesia terbagi menjadi tiga bentuk utama: partai politik, tim sukses, dan jaringan informal. Tim pemenangan berfungsi sebagai jembatan politik yang menghubungkan kandidat dengan masyarakat, bekerja secara terstruktur namun fleksibel, serta menjadi sarana mobilisasi dukungan politik di tingkat lokal.

Sebagai bentuk jaringan politik, tim pemenangan MAMA dibangun melalui integrasi antara jaringan formal yaitu partai politik pengusung dan jaringan non-formal yang melibatkan berbagai kelompok sosial seperti tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi kemasyarakatan. Struktur tim pemenangan yang hierarkis dan berlapis, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa, menunjukkan adanya sistem kerja yang terdesentralisasi namun terkonsolidasi, di mana setiap tingkatan memiliki fungsi koordinasi yang saling terhubung. Hal ini sesuai dengan konsep *networked campaign organization*, yakni bentuk organisasi politik yang mengandalkan hubungan horizontal di antara aktor-aktor sosial untuk mengoptimalkan jangkauan kampanye.

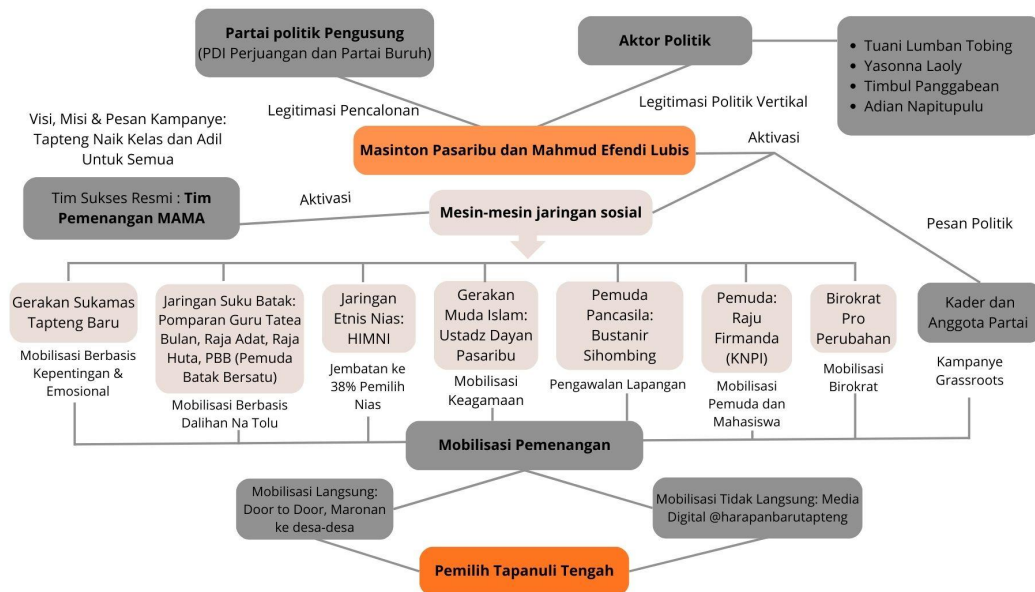
Proses pemetaan wilayah (*political mapping*) yang dilakukan oleh tim pemenangan MAMA menjadi bentuk penerapan strategi berbasis analisis jaringan sosial. Pembagian wilayah ke dalam kategori “hitam, abu-abu, dan basis fanatik” memperlihatkan kemampuan tim dalam membaca dinamika elektoral secara spasial dan sosial. Dengan strategi ini, tim mampu menentukan fokus kampanye yang efektif, memanfaatkan sumber daya secara efisien, serta mengarahkan aktivitas politik sesuai potensi dukungan di tiap wilayah. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa tim pemenangan bukan sekadar instrumen administratif, melainkan juga mesin sosial yang bergerak melalui pengetahuan lokal dan hubungan interpersonal yang kuat.

Dalam perspektif Pierre Bourdieu (1986), tim pemenangan MAMA memanfaatkan dan mengonversi modal sosial (*social capital*) yang dimiliki oleh jaringannya menjadi modal politik (*political capital*). Keberadaan ribuan anggota tim yang tersebar di berbagai lapisan masyarakat menunjukkan bahwa hubungan sosial, kepercayaan, dan solidaritas yang telah terbangun di masyarakat digunakan sebagai instrumen untuk memperluas dukungan politik. Proses ini memperlihatkan bagaimana jaringan sosial diartikulasikan menjadi kekuatan politik elektoral melalui kerja kolektif, simbolik, dan emosional. Tim pemenangan MAMA memanfaatkan emosi politik dan narasi perubahan melalui slogan “Tapteng Naik Kelas dan Adil untuk Semua” yang menjadi simbol mobilisasi kolektif. Isu-isu publik seperti pemerataan dana desa, penghapusan intimidasi politik, dan peningkatan infrastruktur dijadikan sebagai sarana untuk membangun kedekatan emosional antara kandidat dan pemilih. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana politik afektif (*affective politics*) bekerja sebagai energi sosial yang memperkuat loyalitas dan partisipasi di tingkat akar rumput.

Dengan demikian, tim pemenangan MAMA dapat dipahami sebagai bentuk mesin jaringan sosial politik yang bekerja melalui integrasi antara struktur formal dan informal. Ia bukan hanya alat kampanye, melainkan mekanisme reproduksi kekuasaan sosial dan politik di tingkat lokal yang berfungsi mengorganisir, memobilisasi, dan mengartikulasikan kepentingan masyarakat dalam kerangka elektoral. Strategi yang berbasis pada pemetaan sosial, komunikasi emosional, dan kolaborasi lintas jaringan menjadikan tim pemenangan MAMA sebagai model representatif dari praktik jaringan politik lokal di Indonesia yang menempatkan solidaritas sosial dan hubungan personal sebagai basis utama kekuatan elektoral.

Alur (*Flow*) dan interaksi jaringan

Flow jaringan politik merupakan alur atau arus hubungan, komunikasi, dan pengaruh yang terjadi di dalam suatu jaringan politik antara berbagai aktor yang terlibat dalam proses politik. Mulai dari kandidat, tim sukses, partai politik, tokoh masyarakat hingga pemilih di tingkat rumput (*grassroots*). Dalam pelaksanaan Pilkada, flow jaringan politik akan memperlihatkan bagaimana pesan politik, visi, misi, serta strategi kampanye disalurkan melalui jaringan-jaringan formal dan informal. Dengan demikian, flow jaringan politik menunjukkan dinamika pergerakan dan interaksi antar elemen jaringan yang saling terkait, yang pada akhirnya tujuan utamanya adalah mobilisasi dukungan dan kemenangan dalam kontestasi politik. Peneliti akan menggambarkan jaringan politik Masinton dan Mahmud yang digambarkan melalui sistem berlapis yang menggabungkan aktor formal (partai politik, tim sukses), dan aktor informal (mesin-mesin jaringan sosial) yang bertujuan untuk mencapai mobilisasi kemenangan.



Sumber: Data diolah oleh Peneliti

Bagan 1. Flow (Alur) Jaringan Politik Pemenangan MAMA

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pilkada menjadi salah satu perwujudan sistem demokrasi di tingkat lokal yang secara prosedural dan substansial merupakan sarana penegakan demokratisasi di tingkat lokal guna mencapai kedaulatan masyarakat. Peraturan khusus terkait Pilkada bertujuan agar tingkat akuntabilitasnya dan kualitasnya dapat berjalan dengan baik. Pasangan calon kandidat yang mengikuti kontestasi elektoral akan dibantu oleh tim pemenangan baik dari partai politik sebagai organisasi formal ataupun organisasi masyarakat sebagai non formal. Begitu juga pada Pilkada Tapanuli Tengah tahun 2024 yang berhasil dimenangkan oleh pasangan Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemanfaatan jaringan politik Masinton dan Mahmud dalam memenangkan Pilkada Tapanuli Tengah tahun 2024. Sebagaimana menurut Aspinall, bentuk jaringan politik yang menghubungkan patron dan klien yakni tim sukses, partai politik, dan mesin-mesin jaringan sosial.

Pasangan Masinton dan Mahmud merupakan pasangan kandidat calon yang menarik untuk dikaji lebih dalam mengenai jaringan politik yang bekerja dalam memenangkan pasangan ini. Masinton yang dikenal sebagai salah satu politikus nasional yang turun langsung membangun daerah asalnya Tapanuli Tengah yang saat itu terverifikasi mengikuti pasangan calon tunggal. Oleh karena itu, dengan waktu yang singkat Masinton Mahmud harus mampu menarik perhatian masyarakat. Disinilah jaringan politiknya berperan dalam mendukung pasangan Masinton Mahmud dan bantuan dari kelompok atau organisasi masyarakat yang mendukung pemenangannya.

Salah satu jaringan yang bekerja dalam membantu kemenangan Masinton Mahmud adalah gerakan Sukamas Tapteng Baru, yang berinisiatif sudah mengenalkan Masinton Pasaribu sebagai sosok figur kandidat putra daerah yang mampu membawa Tapanuli Tengah menuju perubahan. Gerakan ini sudah bergerak selama dua tahun sebelum diselenggarakannya Pilkada serentak dengan membangun basis jaringannya di masing-masing kecamatan, kelurahan, dan desa-desa di Tapanuli Tengah. Sebagaimana teori jaringan menurut Ruddy yakni jaringan kepentingan (*interest*), dimana kepentingan dari gerakan ini adalah mengenalkan Masinton Pasaribu kepada masyarakat Tapanuli Tengah, yang mana jaringan kekuasaan (*power*) berupaya untuk mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk memenangkan Masinton Pasaribu sebagai Bupati Tapanuli Tengah, dan jaringan emosional (*sentiment*) dengan memanfaatkan pengalaman kolektif atas ketidakadilan,

ketakutan, dan tekanan politik yang dialami oleh masyarakat. Sehingga gerakan Sukamas yang dibangun bukan hanya pada pelaksanaan Pilkada saja, namun telah jauh dibentuk sebelum pelaksanaan Pilkada. Gerakan Sukamas kemudian dikolaborasikan dengan membangun simpul-simpul jaringan baru baik itu jaringan partai politik dan jaringan organisasi masyarakat

Pasangan Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi Lubis memanfaatkan seluruh bentuk jaringan politik yakni, tim sukses yang dibentuk oleh partai politik pengusung PDI Perjuangan dan Partai Buruh yang mengaktifkan seluruh kader-kader politiknya yang tersebar di kecamatan, kelurahan, dan desa-desa untuk mendukung kemenangan Masinton Mahmud. Kader-kader politik ini berperan sebagai akar rumput (*grassroots*) dalam mengkampanyekan pasangan Masinton Mahmud ke masyarakat hingga tingkat paling bawah dan mengawal seluruh tahapan dari proses pendaftaran hingga kemenangan yang sudah dinyatakan secara sah oleh KPU Tapanuli Tengah.

Sementara untuk mesin-mesin jaringan sosial yang hampir tersebar di lingkungan masyarakat membantu pasangan Masinton Mahmud dalam menaikkan elektabilitas pasangan kandidat karena organisasi ini memiliki basis massa yang jelas. Beberapa kelompok organisasi yang terlibat dalam memenangkan pasangan Masinton dan Mahmud adalah Pomparan Guru Tatea Bulan, Himpunan Masyarakat Nias (HIMNI), Organisasi Pemuda Islam, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Pemuda Pancasila (PP), Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan (FKKPI), Pemuda Batak Bersatu (PBB), dan Pujakesuma. Organisasi ini bekerja loyal dalam memenangkan pasangan Masinton Mahmud dalam Pilkada Tapanuli Tengah tahun 2024. Seluruh organisasi masyarakat yang terlibat merupakan alat mobilisasi politik yang digunakan oleh Masinton Mahmud dalam memperkuat legitimasi mereka di basis pendukung masing-masing organisasi yang terlibat.

REFERENSI

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Agusyanto, R. (2012). Dukungan Politik dan Jaringan Komunikasi Sosial Kasus Pemilihan Kepala Daerah Banjarbaru, Kalimantan Selatan. *Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspectives in Communication*, 1(1), 41-54.
- Asrinaldi (2020). *Sisi Lain Pilkada*. Padang: CV Rumah Kayu Pustaka
- Bhera, P. F. L., Rodriquez, S., & Dhosa, D. (2025). Jaringan Politik DPD II Partai Golongan karya Ngada pada Pemilihan Umum Legislatif 2024 di Kabupaten Ngada. *Journal Education and Government Wiyata*, 3(1), 349-356.
- Bode, L., Vraga, E. K., Borah, P., & Shah, D. V. (2014). A new space for political behavior: Political social networking and its democratic consequences. *Journal of Computer-Mediated Communication*, 19(3), 414-429.
- Borgatti, S. P., Mehra, A., Brass, D. J., & Labianca, G. (2009). Network analysis in the social sciences. *science*, 323(5916), 892-895.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Damsar. (2010). *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Denny, J.A. (2006). *Catatan Politik*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta.
- Dewi Kurniawati Hastuti, et al. (2018). Modal, strategi dan jaringan perempuan politisi dalam kandidasi pilkada langsung. *Jurnal Penelitian Politik (LIPI)*, 15(2).
- Firdausi, C. I. (2017). Jaringan Politik Dalam Pilwali Surabayatahun 2015 Studi: Peran Pemuda Pis Dalam Mendukung Pencalonan Risma–Whisnu. *Jurnal Politik Muda*, 6(1), 27-33.
- Firmanzah. (2010). *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Flynn, S. I. (2011). Resource mobilization theory. *Sociology Reference Guide*, 111-121.

- Giyanti, E. S. (2022). *Sumber-Sumber Kekuatan Politik Paguyuban Wisnu Murti pada Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Gyarani, A., Rifqi, J., & Putranto, A. (2025). Peranan Komunikasi Publik pada Partai Pengusung Pilkada 2024 Kabupaten Bogor (Studi Terhadap Pasangan No 1 Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi). *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 6(1), 706-718.
- Hardani, H., Sukmana, D. J., & Fardani, R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group.
- Hasibuan, H. P., Ritonga, M. H., & Azhar, A. A. (2025). Political Communication Strategy in Winning the Regional Election: A Case Study of the Victory of the ERAMAS Pair in the 2018 North Sumatra Regional Election. *Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology*, 6(1), 230-238.
- Hidayaturrahman, M., Moerod, M., Laily, N., Wisman, Y., Goa, L., Derung, T. N., & Handayani, E. (2020). *Teori SoSial Empirik untuk Penelitian Ilmiah Skripsi (Doctoral dissertation, Tesis Dan Disertasi)*. Malang: PT. Literindo Berkah Karya
- Houge (2016). Social Network and Voter Mobilization. *The SAGE Handbook of Electoral Behaviour*. California 241-259 .
- Janedjri Gaffar, M. (2012). *Politik Hukum Pemilu*, Jakarta: Konstitusi PresS.
- JA, D., & Surdiasis, F. (2006). *Catatan Politik*. Yogyakarta: LKIS.
- Jenkins, J. C. (1983). Resource mobilization theory and the study of social movements. *Annual review of sociology*, 9(1), 527-553.
- Komariah, A. (2014). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Laily, N. (2020). Teori Jaringan Sosial. *Teori SoSial empirik*, 161.
- Nan Lin. (2004). *Social Capital: A Theory of Social Structure and Action*. Cambridge: Cambridge University Press
- Liu, W., Sidhu, A., Beacom, A. M., & Valente, T. W. (2017). Social network theory. *The international encyclopedia of media effects*, 1, 1-12.
- Miriam, B. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik edisi revisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Muzaffarsyah, T., Zulhilmi, B. R., & Rizwan, M. (2020). Political Communications Strategy of “Success Team” in Regional Head Election: A Case Study of Bireuen, Aceh. In *Proceedings of the 1st International Conference on Psychology (ICPsy 2019)*, Scitepress (pp. 147-153).
- Moleong, L. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Panggabean, H. P. (2007). *Pembinaan Nilai-Nilai Adat Budaya Batak Dalihan Na Tolu*. Penerbit Dian Utama.
- Pippa Norris. 2014. “Recruitment”, dalam *Handbook Partai Politik*, ed. Richard S. Katz dan William Crotty, (edisi terjemahan). Bandung: Penerbit Nusa Media..
- Pito, T. A., IP, S., Efriza, S., Fasyah, K., & IP, S. (2022). Mengenal teori-teori politik: dari sistem politik sampai korupsi. *Nuansa Cendekia*.
- Pradana, J. S. (2020). *Mobilisasi Politik Kelompok Sayap Partai (Analisis Mengenai Manuver Politik Gerakan Pemuda Ka'bah Kota Yogyakarta dalam Pilpres 2019)* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Prihatmoko, J. J. (2008). *Men demokratis kan pemilu: dari sistem sampai elemen teknis*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Reuven Y. Hazan. (2002). “Candidate Selection” dalam *Comparing Democracies 2*, ed. Lawrence LeDuc, Richard G. Niemi dan Pippa Norris. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications Ltd
- Robert D. Putman. (1999). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. United States of American: The Brookings Institution Press

- Rohim, A. (2019). Pembelahan Dukungan Jaringan Politik Nu Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018. *Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politic)*, 5 (01)
- Santoso, T. (2020). *Memahami modal sosial*. Surabaya: CV Saga Jawadwipa
- Sinaga, P. (2018). Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945. *Binamulia Hukum*, 7(1), 17-25.
- Smith, A. E. (2011). *Local connections: Electoral institutions, social networks, and local politicians in a developing democracy*. University of Pittsburgh.
- Söderlund, P. J. (2005). Electoral success and federal-level influence of Russian regional executives. *Europe-Asia Studies*, 57(4), 521-541.
- Stokes, S. C. (1999). Political parties and democracy. *Annual review of political science*, 2(1), 243-267.
- Sugiyono, P. P. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thomas Santoso. 2020. *Memahami Modal Sosial*. Surabaya: CV Saga Jawadwipa
- Utami, S. A. (2023). Strategi Politik Akar Rumput Dalam Pemenangan Haliana-Ilmiati Pada Pemilihan Serentak 2020. *JAPMAS: Jurnal Politik dan Demokrasi*, 1(2), 147-151.
- Wasserman, S., & Faust, K. (1994). *Social network analysis: Methods and applications*. Newyork: Cambridge University Press.
- Widodo, W. (2015). Pelaksanaan pilkada berdasarkan asas demokrasi dan nilai-nilai pancasila. *Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(1)
- Yulianita, N., & Zakiah, K. (2019, March). Campaign strategy for the election of regional heads in the political communication perspectives. *In Social and Humaniora Research Symposium (SoRes 2018)* (pp. 253-255).